



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TENGGARONG, FEBRUARI 2020

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan. AP. Mangkunegoro Timbau Tenggarong 75511

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia yang dilimpahkan kepada kami sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.

Berakhirnya Implementasi Program Dan Kegiatan tahun Anggaran 2019 ditindak lanjut dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good government) dan dengan penanganan yang baik (good governance/ yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai

Kartanegara ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berkembang secara mandiri setara dengan tingkat kehidupan masyarakat. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tenggarong, Februari 2020

Kepala Pelaksana



Drs. H. MARSIDIK
Pembina Utama Muda
NIP. 19620403 198703 1 020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Instansi yang berada di bawah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan bertanggung jawab Kepada Bupati Kutai Kartanegara, dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian bantuan kepada seluruh unit organisasi, aparatur pemerintah dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Maka dari itu seluruh program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara di dasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Melayani
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Menurunnya Tingkay Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana di segala spek
			Membangun sitim dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana yang handal
			Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan dapat dikatakan Sangat Baik secara kuantitas dan kualitas.

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 terealisasi sebesar **Rp. 29.597.841.990,29** (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilah Puluh Dua Sembilan Rupiah) dengan realisasi **Rp 26.369.089.968,-** (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan Realisasi Fisik 89,09 %.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI BPBD KAB. KUKAR	
1. Kedudukan	4
2. Tugas Dan Pokok.....	5
3. Fungsi.....	7
4. Struktur.....	7
5. Sumber Daya manusia (SDM)	10
6. Sarana Dan Prasarana Kantor	12
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	15
1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA BPBD	
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	17
2.2 VISI DAN MISI	18
2.3 TUJUAN DAN SASARAN	19
2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	20
2.5 RENCANA KERJA TAHUNAN	20
2.6 INDIKATOR KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA	22
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	30

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1 : Pengukuran Kinerja

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 3 : Matrik Rencana Strategis

Lampiran 4 : Laporan Realisasi Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Takdir menempatkan Indonesia berada dipertemuan tiga lempeng tektonik (Australia, Eurasia dan Pasifik) sehingga pantas dijuluki *Super Market Bencana* (Semua Jenis Bencana Ada). Wajar bila menjadi salah satu Negara yang paling rentan bencana.

Bencana alam maupun nonalam, hari-hari ini sudah menjadi bagian keseharian kita. Revolusi teknologi informs tidak saya mengabarkan kejadian petaka di belahan bumi lain, tetapi dengan video real time, kejadian-kejadian tersebut seakan-akan lekat dan dekat dengan kita. Frekuensi kejadiannya pun tak terbilang, tidak lagi perbulan, per minggu, per hari bahkan per jam tetapi sudah setiap menit dan setiap detik. Bencana menjadi matra sakti hingga membuat public dan berbagai ekemen masyarakat luas makin tahu dan familiar dengan bencana dan juga memnbuat masyarakat panic akan bencana yang terjadi di sekitar mereka. Mungkin, karena bencana selalu membelot nalar kemanusiaan dan mengetuk pintu iba hati setiap insan maka setiap bencaa tak luput dari perhatian kita.

Bangsa Indonesia sekarang ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : Transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan

yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KLjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. KLJIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Pelaksanaan penyusunan KLjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan KLJIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
13. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015.

Penyusunan KLjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian KLjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Sekretaris Daerah yang menjabat secara rangkap sebagai Kepala Badan. KLjIP ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam KLjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2019.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi

pengecahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadinya Pemadam Kebakaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1.2.1 Kedudukan

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penanggulangan Bencana, Perda No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Perbup Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Badan Penanggulanga Bencana daerah, dimana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh BPBD. Kebijakan penanggulangan bencana perlu diakomodasikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan lingkungan.

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktur.

Bencana, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana. Meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menyimpannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah serta peraturan bupati, gambaran umum pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPBD adalah pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi dan pelaksanaan kewenangan otonomi, di mana Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sebagai pemegang amanah Otonomi, menjadi penanggung jawab utama, dan sesuai undang-undang mempunyai kewajiban antara lain (a) Melindungi masyarakat..." dan (b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat..." Di sisi lain undang-undang-undang juga menyatakan bahwa ; (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 22 dan 156; UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), yang dalam praktek dan implementasinya pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik yang dalam praktek dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.2.2 Tugas Dan Pokok

a. Pra bencana

Pada situasi tidak terjadi bencana, bertugas:

1. Melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
2. Melakukan upaya pengurangan dan pencegahan risiko bencana;
3. Melakukan penerapan rencana tata ruang;
4. Melakukan koorBadani pelestarian fungsi lingkungan hidup;

5. Melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
7. Menyusun persyaratan analisis risiko bencana; dan
8. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pada situasi terdapat potensi bencana, bertugas melakukan:

1. Mitigasi;
2. Kesiapsiagaan; dan
3. Peringatan Dini

b. Tanggap Darurat

Saat tanggap darurat, bertugas:

- a) Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 1. Pencarian dan penyelamatan korban;
 2. Pertolongan darurat; dan
 3. Evakuasi korban dan harta benda.
- b) Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 2. Pangan;
 3. Sandang;
 4. Penampungan dan tempat hunian

c. Pasca Bencana

Pasca bencana tugas meliputi;

1. Rehabilitasi;
 - 1) Pendataan
 - 2) Peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
 - 3) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - 4) Perbaikan prasana dan sarana umum;
 - 5) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - 6) Pemulihan sosial psikologis;
 - 7) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - 8) Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - 9) Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 10) Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - 11) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Rekonstruksi
 - 1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - 3) Revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;

- 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) Peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- 6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- 7) Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

1.2.3 Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) **PengkoorBadanian**, yang merupakan fungsi koorBadani yang dilaksanakan melalui kegiatan koorBadani dengan SKPA dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.
- b) **Pengkomandoan**, yang merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c) **Pelaksana**, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoorBadani dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.4 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

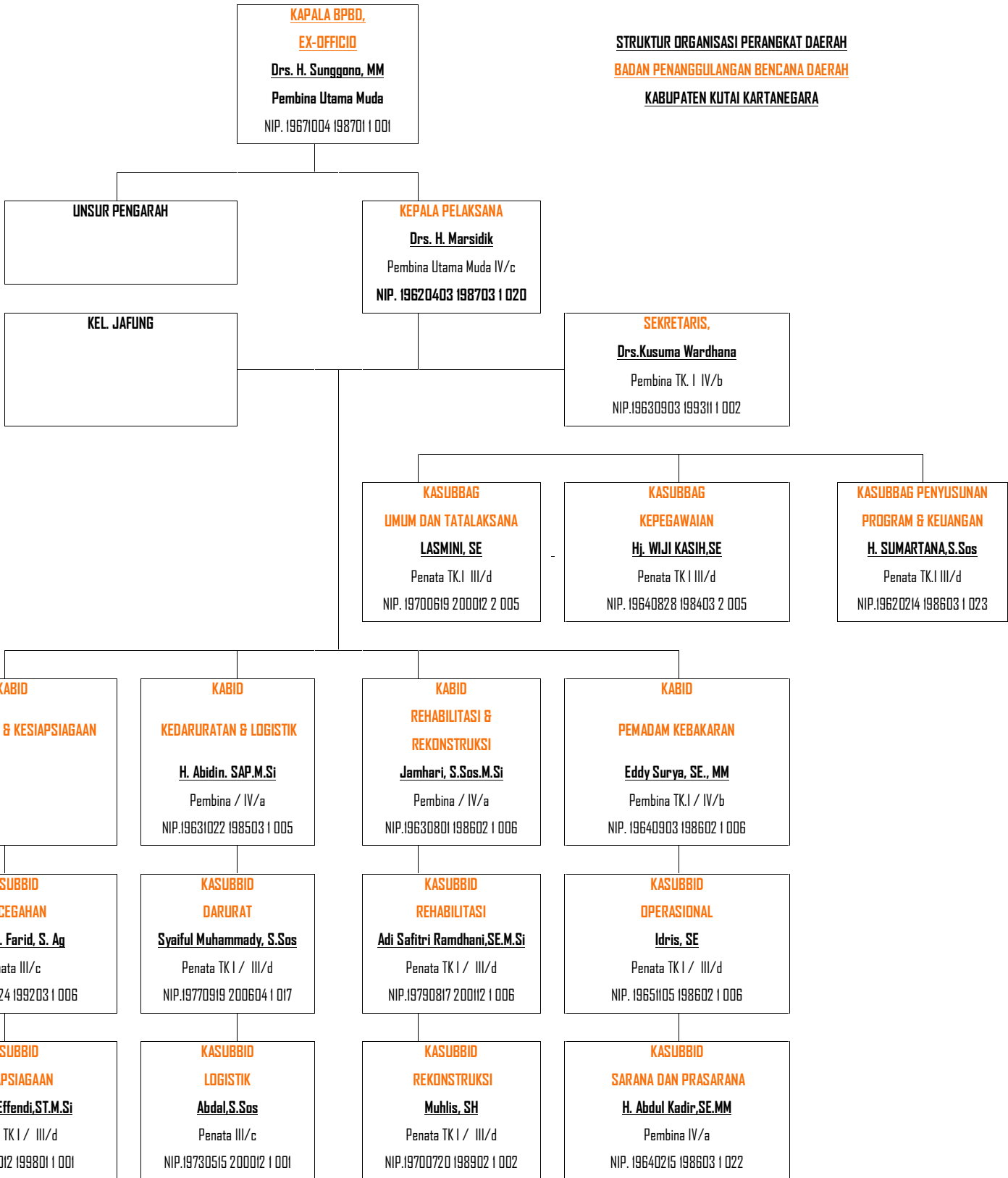
Berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, maka organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dijabat oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Unsur Pengarah terdiri dari unsur-unsur yang berasal dan mewakili OPD terkait di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian lagi berasal dan mewakili masyarakat profesional yang memiliki kompetensi dan ahli di bidangkebencanaan. Sedang Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD, dengan susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a) Kepala Pelaksana ;
- b) Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pencegahan;
 - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- d) Bidang Kedaruratan dan logistik, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kedaruratan;
 - 2. Sub Bidang Logistik;
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi;
- f) Kelompok Jabatan fungsional

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini :



Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kutai Kartanegara. Dalam menjalankan fungsinya kepala BPBD atas nama Bupati Kutai Kartanegara mengangkat seorang Kepala Pelaksana BPBD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Pelaksana BPBD dibantu oleh satu Sekretaris dan empat kepala bidang. Masing-masing bagian dan bidang tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

No.	Pangkat	Gol.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/E	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/D	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda	IV/C	1	-	1
4.	Pembina Tingkat I	IV/B	2	-	2
5.	Pembina	IV/A	6	1	7
6.	Penata Tingkat I	III/D	7	3	10
7.	Penata	III/C	2	1	3
8.	Penata Muda Tingkat I	III/B	5	-	5
9.	Penata Muda	III/A	4	-	4
10.	Pengatur Tingkat I	II/D	19	3	22
11.	Pengatur	II/C	17	6	23
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	10	1	11
13.	Pengatur Muda	II/A	5	-	4
14.	Juru Tingkat I	I/D	-	-	-
15.	Juru	I/C	3	-	3
16.	Juru Muda Tingkat I	I/B	-	-	-
17.	Juru Muda	I/A	-	-	0
	Jumlah		81	15	96

Sumber Data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebanyak 96 orang Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	0
2.	Pasca Sarjana (S2)	7	3	10
3.	Sarjana (S1)	24	9	33
4.	Sarjana Muda	-	-	-
5.	SLTA/SMU	43	4	47
6.	SLTP	2	-	2
7.	Sekolah Dasar	4	-	4
Jumlah		79	17	96

Sumber Data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 3. Jumlah Pejabat Struktural

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Esselon II/B	-	-	-
2.	Esselon III/A	1	-	1
3.	Esselon III/B	3	-	3
4.	Esselon IV/A	11	2	13
Jumlah		15	2	17

Sumber Data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 4. Jumlah Tenaga Honor/THL menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
3.	Sarjana (S1)	32	10	42
4.	Sarjana Muda	3	1	4
5.	SLTA/SMU	152	16	168
6.	SLTP	7	-	7
7.	Sekolah Dasar	3	-	3
Jumlah		197	27	224

Sumber Data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 5. Jumlah Petugas Operasional telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana

No.	Nama Diklat	Jumlah (orang)	Ket.
1.	SAR MFR Dan Water Rescue	25	
2.	Jungle Rescue	25	
3.	HART Dan MFR	20	

4.	Scuba Diving And Sea Survival	20	
5.	Water Rescue Lanjutan	20	
6.	Personil DAMKAR Tingkat Dasar	33	
7.	Personil DAMKAR Tingkat Lanjutan	12	
8.	Basic Water Rescue	25	

Sumber Data : Seksi Diklat

1.2.6 Sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki sesuai Tabel berikut :

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Gedung Kantor Badan	2 Buah	Baik
2.	Pos Penanggulangan Bencana di Kecamatan	6 Buah	Baik
	JUMLAH	8 Buah	

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Mercedes Benz/1525 AF /4X4 (Ziegler Damkar)	3 Buah	Baik
2.	Hino WU342R- HKMRJD3 (Damkar)	3 Buah	Baik
3.	Toyota Dyna Long XZU342R-TKMQSD3 4.00 (Damkar)	2 Buah	Baik
4.	Toyota Dyna Long 4.600 X2U342R-TKMQSD (Damkar)	2 Buah	Baik
5.	Isuzu NKR 66 (Damkar)	2 Buah	Baik
6.	Ford Ranger 4X4 2900 cc Diesel MT	2 Buah	Baik
7.	Toyota KF 60 Kijang STD Pick UP (Damkar)	1 Buah	Baik
8.	Isuzu NKR 66 4334 (Damkar)	1 Buah	Baik
9.	Mercedes Benz 700 (Damkar)	1 Buah	Baik
10.	Toyota / Innova E Standar	1 Buah	Baik
11.	NISSAN	1 Buah	Baik
12.	Ford Rangger	1 Buah	Baik
13.	Ford	1 Buah	Baik
14.	Toyota	1 Buah	Baik
15.	Isuzu	1 Buah	Baik

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 8. Sarana dan Prasarana berupa Aset/Tanah/Peralatan/Perlengkapan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	Baik	
2.	Tanah bangunan Pos Jaga/Menara jaga	2	Baik	
3.	Mobil Roda 4	19	Baik	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
		3	Kurang Baik	
4.	Roda 2	12	Baik	
		1	Kurang Baik	
5.	Mesin Compresor	1	Baik	
6.	Dongkrak Mekanik	1	Baik	
7.	Perkakas Bengkel Kerja Lain-Lain	1	Baik	
8.	Lemari Penyimpanan	1	Baik	
9.	Mesin Ketik Standar	3	Baik	
10.	Mesin Hitung	1	Rusak Berat	
11.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Kurang Baik	
12.	Lemari Besi	6	Baik	
13.	Rak Besi/Metal	1	Baik	
14.	Filling Kayu	5	Baik	
15.	Brankas	1	Baik	
16.	Lemari Kayu	1	Baik	
17.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	
18.	White Board	1	Kurang Baik	
19.	Alat Kantor Lainnya	3	Baik	
20.	Lemari Kayu	1	Baik	
21.	Meja Kayu/Rotan	1	Kurang Baik	
22.	Tempat Tidur Besi	2	Baik	
23.	Meja Rapat	5	Baik	
24.	Kursi Rapat	101	Baik	
25.	Kasur	1	Baik	
26.	Kasur	14	Rusak Berat	
27.	Tenda	2	Baik	
28.	Sofa	2	Baik	
29.	Jam Elektronik	5	Baik	
30.	Lemari Es	4	Baik	
31.	AC	19	Baik	
32.	AC	1	Kurang Baik	
33.	Kompas Gas	1	Baik	
34.	Tabung Gas	1	Baik	
35.	Alat Dapur lainnya	1	Rusak Berat	
36.	Alat Dapur Lainnya	1	Baik	
37.	Kamera Film	3	Baik	
38.	Alat Hiasan	1	Baik	
39.	Dispenser	1	Baik	
40.	Handycam	1	Rusak Berat	
41.	Handycam	1	Baik	
42.	Alat Pemadam Portable	3	Baik	
43.	Pompa Kebakaran	2	Baik	
44.	Pipa Pemancar	16	Baik	
45.	Baju Anti Panas	4	Baik	
46.	Masker Gas	60	Baik	
47.	Alat Pembantu Kebakaran	156	Baik	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
48.	PC / Komputer	6	Baik	
49.	Notebook	10	Baik	
50.	Peralatan Komputer Lainnya	1	Baik	
51.	Printer	8	Baik	
52.	Monitor	5	Baik	
53.	Peralatan Personal Komputer	2	Baik	
54.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
55.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
56.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
57.	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
58.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik	
59.	Proyektor	1	Baik	
60.	UPS	1	Baik	
61.	Handy Talky	1	Baik	
62.	Faxmili	1	Baik	
63.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Baik	
64.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Rusak Berat	
65.	Alat Komunikasi Radio SSB	1	Baik	
66.	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1	Baik	
67.	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	
68.	Gedung Kantor Semi Permanen	1	Baik	
69.	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2	Baik	
70.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1	Baik	
71.	Bangunan Hidran Umum	1	Baik	
72.	BCD	6	Baik	
73.	Tabung Scuba	6	Baik	
74.	Baju Scuba	5	Baik	
75.	Regulator	6	Baik	
76.	Sepatu Scuba	5	Baik	
77.	Vines	6	Baik	
78.	Pisau	6	Baik	
79.	Masker	6	Baik	
80.	Senter	6	Baik	
81.	Snorkel	6	Baik	
82.	Slayer	6	Baik	
83.	Sarung Tangan	6	Baik	
84.	Belt	6	Baik	
85.	Weight 4 Kg	5	Baik	
86.	Weight 2 Kg	10	Baik	
87.	Selang Compressor	3	Baik	
88.	Compressor	1	Baik	
89.	Filter Compressor	5	Baik	
90.	Minyak nabati	8	Baik	
91.	Mesin Boat	3	Baik	
92.	Rubber Boat	2	Baik	
		1	Kurang Baik	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
93.	Speed Boat dan Mesin	1	1	
94.	Tangki BBM	3	3	
95.	Life Jacket	5	5	
96.	Badan Ces	1	Kurang Baik	
97.	Mesin Ces	1	Baik	
98.	Tenda	2	Baik	
		5	Kurang Baik	
99.	Tali	3	3	
100	Velm Bed	23	Baik	
		1	Kurang Baik	
101	Kantong mayat	21	21	
102	Tandu	1	1	
103	Terpal	9	9	

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (KLJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik, dan merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi dapat terpenuhi melalui strategi pencapaian (Program dan kegiatan) yang selaras. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (KLjIP) Tahun 2019 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance*

results) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (KLjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Executive Summary, menyajikan ringkasan isi dari KLjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 meliputi RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama tiga tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memandang bahwa dari sisi manajemen, Renstra dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- Gambaran visi, misi persepsi interpretasi serta strategi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan program dan kegiatan.
- Alat untuk memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

2.2 VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD, termasuk rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan /atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021 dalam masa kepemimpinannya adalah **“KUTAI KARTANEGARA MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”**.

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 tersebut, maka ditentukan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Memantapkan Reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transpormasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta
8. penguatan perlindungan anak.

Program Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui RPJMD 2016-2021, program strategis yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah terdiri atas atas 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Program penanggulangan bencana kebakaran
2. Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

3. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
4. Program tanggap darurat penanggulangan bencana
5. Prograam Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana
6. Prograam perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari pernyataan Visi Organisasi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurung waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun kedepan Tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang, dapat bersifat kualitatif dan diupayakan terfokus pada suatu peningkatan hasil pembangunan.

Dalam rangka menjalankan Misi untuk mencapai Visi, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tujuan pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah

2.3.2 Sasaran

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sasaran dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Menurunnya Tingkat Risiko Bencana

2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI		“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”	
MISI		<i>Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat.</i>	
Tujuan	Sasaran	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Kualitas Kepuasan Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana dan kebakaran di segala aspek. Upaya tersebut harus didukung dengan kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan kesiapsiagaan seluruh komponen baik pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kemungkinan terjadinya bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. b. Melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek dalam upaya penanggulangan bencana dan kebakaran. 2. Membangun sistem dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana dan kebakaran yang handal dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan kepekaan, ketangguhan, dan partisipasi masyarakat secara melembaga dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. b. Membangun Jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, baik dari Instansi Pemerintah, swasta, akademisi, TNI/POLRI, maupun nasional maupun internasional 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam upaya pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat. b. Membangun Jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja SDM aparatur yang berkualitas dan professional dalam rangka penanggulangan bencana; 2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang berkualitas kepada masyarakat; 3. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas kedaruratan serta rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 4. Memprioritaskan program yang mengarah pada koordinasi baik antar SKPD maupun masyarakat dan peningkatan partisipasi stakeholders dalam penanggulangan bencana dan kebakaran pada daerah rawan bencana.

2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Adapun program kerja operasional merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja. Program-program tersebut telah ditetapkan di RPJMD, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara hanya mengindukkan diri pada program-program yang

ada sesuai dengan tugas dan fungsinya. Atas dasar hal tersebut, serta mengingat tugas dan fungsi, maka program-program operasional yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

No	Program	Indikator
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Layanan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase kegiatan/sosialisasi pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
7	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Cakupan daerah rawan bencana
8	Program Pencegahan Dan kesiapsiagaan Penanggulangan bencana	Cakupan daerah rawan bencana
9	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran
10	Program Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Persentase perbaikan Perumahan Akibat Bencana
11	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan	Cakupan Daerah Rawan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Program di atas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian dan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.6 INDIKATOR KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan digunakan untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
Misi 1 : Meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana termasuk kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi, serta pemberdayaan masyarakat			
Indikator Kinerja Pendukung (IKP) 1	Meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana	Tersedianya perencanaan program dan kegiatan BPBD	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan
Indikator Kinerja Pendukung (IKP) 2		tersedianya sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya	Jumlah sarana dan prasarana
Indikator Kinerja Pendukung (IKP) 3		aparatur yang menunjang	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti diklat lingkup penanggulangan bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1		Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana	Frekuensi koordinasi antar SKPD, Masyarakat dan stakeholder
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2	Mensosialisasikan Upaya-upaya Kesiapsiagaan, Peringatan Dini dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya sosialisasi dan promosi dalam upaya kesiapsiagaan	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan promosi kesiapsiagaan
Indikator Kinerja Utama (IKU) 3	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan resiko bencana termasuk kesiapsiagaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan kearifan local	Jumlah pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana
Misi 2 : Meningkatkan upaya penanganan dan penanggulangan bencana terhadap korban dan harta benda			
Indikator Kinerja	Meningkatkan Upaya	terlaksananya upaya penanganan dan	Persentase upaya

URAIAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
Utama (IKU) 4	Penanganan dan Penanggulangan Bencana Dalam Kerangka Tanggap Darurat Bencana	penanggulangan bencana melalui upaya tanggap darurat	penanganan dan penanggulangan bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU) 5		tersusun dan terlaksananya protap (juknis dan juklak) mengenai penanganan bencana dan manajemen logistic	Jumlah Dokumen SOP dan SOG
Indikator Kinerja Utama (IKU)6	Menciptakan Sistem Manajemen Logistik Dan Bantuan Dalam Kondisi Darurat Bencana	Terciptanya sistem manajemen logistik dan bantuan bencana yang terpadu	Persentase peningkatan sistem manajemen logistik
Indikator Kinerja Utama (IKU)7		Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban dan masyarakat yang terkena bencana	Persentase distribusi logistik korban bencana
Misi 3 : Meningkatkan upaya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			
Indikator Kinerja Utama (IKU)8	Meningkatkan Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah dan Masyarakat Pasca Bencana	terlaksananya upaya terpadu rehabilitasi dan rekonstruksi daerah dan masyarakat pasca bencana	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
Misi 4 : Memperkuat kapasitas kelembagaan dan jaringan kerjasama dan koordinasi dalam penanggulangan bencana			
Indikator Kinerja Utama (IKU)9	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran	tersusunnya kelengkapan organisasi/kelembagaan Badan (tatalaksana)	Jumlah kajian penataan kelembagaan BPBD
Indikator Kinerja Utama (IKU)10		tersedianya pos penanggulangan bencana di setiap kecamatan	Jumlah pendirian pos penanggulangan bencana di kecamatan

Dari IKU di atas, maka dijabarkan dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar untuk Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2019. Untuk target kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				244.000.000,00
Tersedianya Sarana Damkar	Terpenuhinya Sarana Damkar	44 Unit	Pemenuhan Sarana Damkar	144.000.000,00
Terwujudnya Apel Hari Kesiapsiagaan	Terlaksananya Apel Hari Kesiapsiagaan	300 Orang	Apel Kesiapsiagaan Dan Gelar Peralatan	100.000.000,00
Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam				179.000.000,00
Terlaksananya Pelatihan Siaga Bencana Desa/Kelurahan	Terpenuhinya Masyarakat Tentang Siaga Bencana di Desa/Kelurahan	50 Orang	Pelatihan Siaga Bencana Desa/Kelurahan	179.000.000,00
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana				2.947.495.500,00
Terlaksananya Tanggap darurat Bencana Kebakaran	Meningkatnya Darurat Bencana Kebakaran	100 %	Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	1.075.000.000,00
Terlaksananya Tanggap Darurat Bencana Alam/Non Alam	Meningkatnya Darurat Bencana Alam/Non Alam	100 %	Tanggap Darurat Bencana Alam/Non Alam	750.000.000,00
Tersedianya Logistik Pb Sesuai Kebutuhan	Terpenuhinya Logistik Dan Peralatan Korban Bencana Dan Kecelakaan	220 Paket	Pemenuhan logistik dan Kebutuhan dasar Korban Bencana	700.000.000,00
Terlaksananya Pembersihan Dan Penyemprotan Lokasi Longsor	Terpenuhinya Pembersihan Dan Penyemprotan Lokasi Longsor	Kegiatan	Pembersihan dan Penyemprotan Lokasi Pasca Bencana Tanah Longsor	422.495.500,00
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				200.000.000,00
Tersedianya Fasilitas Desa Tangguh Bencana	Terpenuhinya fasilitas Desa Tangguh Bencana	2 Desa	Fasilitas persiapan Desa Tangguh Bencana	200.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana				479.787.800,00
Masyarakat Korban Bencana	Terwujudnya Hasil Verifikasi Pasca Bencana	75 Kejadian	Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana	200.000.000,00
Terpenuhinya Bantuan Rumah Untuk Masyarakat	Terwujudnya Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat	100 %	Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat	100.000.000,00
Monitoring Dan Evaluasi Pengkajian Kebutuhan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Terlaksananya Pengkajian Kebutuhan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	75 Kejadian	Pengkajian Kebutuhan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	179.787.800,00
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan				10.388.117.400,00
Terwujudnya Patroli Pencegahan Pengendalian	Jumlah Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran	18 Kecamatan	Patroli, pencegahan dan	1.000.000.000,00

Kebakaran Hutan Dan Lahan	Hutan Dan Lahan		pengendalian kebakaran hutan dan lahan	
Terpenuhinya Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan	Jumlah Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan	18 Kecamatan	Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan	700.000.000,00
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Dan Rapat Kerja	Jumlah Koordinasi Dan Rapat Kerja	10 Kegiatan	Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain	528.525.400,00
Terlaksananya Pendampingan Masyarakat Peduli Api	Jumlah Masyarakat Peduli Api	18 Kecamatan	Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	636.000.000,00
Tersedianya Papan Informasi Kebencanaan Kebakaran Hutan Dan Lahan	Jumlah Papan Informasi Kebencanaan Kebakaran Hutan Dan Lahan	18 Kecamatan	Pembuatan, Pemasangan Dan Sosialisasi Rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	600.000.000,00
Tersusunnya kelengkapan Dokumen Hasil Analisa Data Groundcheck	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data Groundcheck	1 Dokumen	Groundcheck Hotspot dan atau Informasi Kabakaran	343.000.000,00
Terlaksananya Sekolah yang Paham akan Pengendalian Karhutla	Jumlah Sekolah Kampanye Pengendalian Karhutla	3 Sekolah	Kampanye Pengendalian Karhutla Melalui Kegiatan di Sekolah	300.000.000,00
Monitoring Dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Lahan Dan Hutan	Jumlah Luas Areal Bekas Kebakaran Lahan Dan Hutan	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Lahan Dan Hutan	300.000.000,00
Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	30 Unit	Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	5.980.592.000,00
Jumlah				20.896.344.460,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (KLJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen yang berisi gambaran pelaksanaan akuntabilitas yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Hakekat KLJIP BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah alat untuk mengukur kinerja BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara. KLJIP disusun berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang ditetapkan dengan meliputi : Input (masukan), Output (keluaran), Outcome (hasil), Benefit (manfaat) dan Impact (dampak). Namun indikator manfaat dan dampak tidak dapat diukur secara cepat dan terimplementasikan dalam satu atau dua kegiatan saja, melainkan sangat berkaitan dengan kegiatan lainnya sehingga implementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur atau sistem data yang didukung dengan sub-sub sistem.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran sesuai rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akuntabilitas kinerja meliputi kinerja keberhasilan dan kegagalan yang tercermin dari hasil indikator kinerja serta adanya informasi dan data bagi kepentingan pembuatan keputusan untuk kegiatan selanjutnya.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis instansi pemerintah. Penilaian keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program kebijakan menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ✓ 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- ✓ 70 s/d <85 : Berhasil
- ✓ 55 s/d <70 : Cukup Berhasil
- ✓ 0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kreteria
1	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	IRB	125	72	82,01	Berhasil

Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Keuangan

Untuk melihat lebih jauh hasil dari pengukuran kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan Format PKK yaitu Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana jika dilihat dari hasil prosentase Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dari 11 Program dan 47 kegiatan menunjukkan persentase sebesar 85,85 %.

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.219.043.760,00	3.902.049.962,00	92,49
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	211.491.912,00	70,50
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	28.549.00,00	81,57
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00	32.039.810,00	32,04
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	285.873.400,00	283.783.400,00	99,27
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	130.000.000,00	127.194.000,00	97,84
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	9.069.000,00	86,37
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	58.400.000,00	14.449.860,00	24,74
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.00,00	30.985.000,00	88,53
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	100.000.000,00	90.145.000,00	90,15
11	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	2.300.623.360,00	2.227.988.877,00	96,84
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.000.000,00	94.631.900,00	99,61
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dan Ke Luar Daerah	648.347.000,00	648.107.700,00	99,96
14	Perlindungan/Asuransi Satgas Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	95.464.503,00	95,46
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Khusus hari-hari tertentu	15.500.000,00	3.350.000,00	21,61
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.372.000.000,00	1.364.104.878,00	99,42
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.173.000.000,00	1.171.460.178,00	99,87
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	75.000.000,00	74.973.100,00	99,96

18	Pengelolaan Website BPBD	0	0	0
19	Pengelolaan Dan Penataan Arsip Perangkat Daerah	50.000.000,00	47.258.800,00	94,52
20	Pengembangan Bangunan Gedung/Kantor	74.000.000,00	70.412.800,00	95,15
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	175.000.000,00	169.324.900,00	96,76
21	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	175.000.000,00	169.324.900,00	96,76
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	166.000.000,00	151.142.600,00	91,05
22	Pembinaan jasmani dan rohani bagi aparatur	90.000.000,00	83.772.000,00	93,08
23	Fasilitasi Tim Bekias	76.000.000,00	67.370.600,00	88,65
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	525.900.000,00	510.097.763,00	97,00
24	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	200.000.00,00	195.737.163,00	97,87
25	Penyusunan SOP Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	99.375.600,00	99,38
26	Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	125.900.000,00	123.174.400,00	97,84
27	Pembuatan Aplikasi Barang Persediaan BMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000,00	91.810.600,00	91,81
6	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	244.000.000,00	225.463.300,00	92,40
28	Pemenuhan Sarana Damkar	144.000.000,00	129.873.500,00	90,19
29	Apel Kesiapsiagaan Dan Gelar Peralatan	100.000.000,00	95.588.800,00	95,59
7	Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam	179.000.00,00	171.637.600,00	95,89
30	Pelatihan siaga bencana Desa/Kelurahan	179.000.00,00	171.637.600,00	95,89
8	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	2.947.495.500,00	2.752.551.550,00	93,39
31	Tanggap darurat bencana kebakaran	1.075.000.000,00	1.064.313.200,00	99,01
32	Tanggap darurat bencana alam / non alam	750.000.000,00	743.900.800,00	99,19
33	Pemenuhan logistik dan Kebutuhan dasar Korban Bencana	700.000.000,00	671.996.200,00	96,00
34	Pembersihan dan Penyemprotan Lokasi Pasca Bencana Tanah Longsor	422.495.500,00	272.341.350,00	64,46
9	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	200.000.000,00	183.231.800,00	91,62
35	Fasilitasi Persiapan Desa Tangguh Bencana	200.000.000,00	183.231.800,00	91,62
10	Program Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	479.787.800,00	460.725.600,00	96,03
36	Verifikasi dan pendataan pasca bencana	200.000.000,00	199.311.000,00	99,66
37	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat Bagi Korban Kebakaran Dan Bencana	100.000.000,00	93.498.400,00	93,50
38	Pengkajian Kebutuhan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	179.787.800,00	167.916.200,00	93,40
11	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan	10.388.117.400,00	8.048.585.550,00	77,48
39	Patroli, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	1.000.000.000,00	395.428.400,00	39,54
40	Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan	700.000.000,00	498.915.250,00	69,99
41	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja Dan Lain-lain	528.525.400,00	501.525.200,00	94,89
42	Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli	636.000.000,00	560.533.200,00	88,13

	Api (MPA)			
43	Pembuatan, Pemasangan Dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan	600.000.000,00	16.275.000,00	2,71
44	Groundcheck Hotspot dan atau Informasi Kabakaran	343.000.000,00	39.715.000,00	11,58
45	Kampanye Pengendalian Karhutla Melalui Kegiatan di Sekolah	300.000.000,00	275.232.500,00	91,74
46	Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Lahan Dan Hutan	300.000.000,00	242.970.000,00	80,99
47	Pengadaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	5.980.592.000,00	5.526.991.000,00	92,42
	JUMLAH	20.896.344.460,00	17.938.714.503,00	85,85

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai salah satu upaya pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan capaian Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (tahun 2018). Dari tabel pencapaian realisasi keuangan tahun 2018, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Tahun 2018 sebesar 89,69%, realisasi anggaran Tahun 2019 85,85% ini merupakan adanya penurunan penyerapan anggaran yang dikarenakan waktu yang kurang maksimal.

Demikian pula dengan perbandingan pencapaian *outcome* Tahun 2019 dengan pencapaian *outcome* 2018 terhadap sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten kutai kartanegara. dari perbandingan tersebut dapat dinilai bahwa pencapaian sasaran pada Tahun 2019 masih kurang lebih baik daripada tahun 2018.

perbandingan yang cukup signifikan ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Semakin baiknya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.
2. Belum sempurnanya pengukuran kinerja pada Tahun 2019 yang disebabkan karena belum sempurnanya penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Perda Penanggulangan Bencana seperti beberapa target sasaran masih bersifat output dan tidak semua sasaran memiliki target yang jelas (sulit diukur) serta terlalu banyaknya sasaran yang ingin dicapai.
3. Dengan kondisi ketidaksempurnaan Renstra tersebut, maka penetapan renja tidak berdasarkan dokumen perencanaan yang seharusnya. Dan kondisi ini juga mempengaruhi

pengukuran kinerja output dan outcome menjadi tidak jelas dan tidak dapat mereprestasikan kinerja yang sesungguhnya.

4. Untuk Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara mendapatkan kegiatan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) dimana anggaran tersebut cair saat akhir tahun, maka dari itu kegiatan ada yang tidak bias berjalan karena waktu yang terbatas.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17.394.094.160,00 Pagu Sesudah Perubahan Sebesar Rp 20.896.344.464,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.938.714.503,00 atau sebesar 85,85 %. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada anggaran sesuai dengan kegiatan yang ada.

No	Uraian Kegiatan	Anggaran			
		Pagu Dana (Rp)	Pagu Dana (Rp) Sesudah Perubahan	Realisasi Keuangan	
				(Rp)	(%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.069.043.760,00	4.219.043.760,00	3.902.049.962,00	92,49
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.098.000.000,00	1.372.000.000,00	1.364.104.878,00	99,42
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	175.000.000,00	175.000.000,00	169,324.900,00	96,76
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	190.000.000,00	166.000.000,00	151.142.600,00	91,05
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	525.900.000,00	525.900.000,00	510.097.763,00	97,00
6	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	644.000.000,00	244.000.000,00	225.463.300,00	92,40
7	Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam	179.000.000,00	179.000.00,00	171.637.600,00	95,89
8	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	1.925.000.000,00	2.947.495.500,00	2.752.551.550,00	93,39
9	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	200.000.000,00	200.000.000,00	183.231.800,00	91,62
10	Program Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	300.000.000,00	479.787.800,00	460.725.600,00	96,03
11	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan	8.088.150.400,00	10.388.117.400,00	8.048.585.550,00	77,48
	JUMLAH	17.394.094.160,00	20.896.344.460,00	17.938.714.503,00	85,85

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ke-3 dari Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara umum Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019 telah terlaksana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini dapat dilihat dari 11 Program 47 kegiatan yang ada.

Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan serta kerja sama antara Kepala Pelaksana, Kabid, Subbid, Subbag, Satgas Pemadam, Satgas SAR serta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang semakin kondusif.

Dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kerjasama Pemerintah, Masyarakat Dan Dunia Usaha untuk menjaga Keamanan , Ketertiban Dan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana
2. Meningkatkan Pencegahan, Pengurangan resiko bencana, peringatan dini dan mitigasi dalam menghadapi ancaman bencana
3. Tersedianya Pos Penanggulangan Bencana di Setiap Kecamatan
4. Terwujudnya Perbaikan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana
5. Tersedianya Hunian Sementara Korban Bencana atau Pasca Bencana
6. Tersedianya Alat Deteksi Dini Bencana
7. Tersediannya Sarana Dan Prasarana Umum Kedaruratan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Korban Bencana/ Kecelakaan
8. Berdirinya Gedung PUSDALOPS-PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana).